

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian di Indonesia merupakan salah satu elemen yang berpengaruh di kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Berbagai hambatan pernah melanda perekonomian di Indonesia, misalnya saja Indonesia pernah mengalami krisis moneter. Pada saat itu perekonomian di Indonesia mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan nilai rupiah jatuh dan memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Perekonomian hampir lumpuh sehingga menyebabkan jumlah kemiskinan serta pengangguran meningkat drastis. Ketika kondisi ekonomi Indonesia buruk, hanya UMKM yang masih berdiri kokoh dan tidak berkurang jumlahnya (Sugiri, 2020).

UMKM merupakan salah satu sendi perekonomian di Indonesia. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM adalah suatu usaha milik individu atau badan usaha yang membantu memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan masyarakat (Fadli, 2021). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM saat ini adalah 64,2 juta. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia agar menjadi lebih baik (Masruroh et al., 2021) . Oleh karena itu UMKM di Indonesia perlu diberdayakan dengan baik. Karena pada kenyataannya UMKM di Indonesia masih terkendala dengan permodalan, tentunya hal tersebut menghambat UMKM di Indonesia untuk berkembang menjadi lebih baik.

Akan tetapi pemerintah sudah berperan dengan memberikan kebijakan yaitu adanya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama adalah meningkatkan layanan-layanan dibidang jasa keuangan. Kedua,yaitu meningkatkan infrastruktur, seperti kemudahan akses pasar, kemudahan transaksi perdagangan dan juga layanan penagihan atau pembayaran. Ketiga, peningkatan kemampuan dari para pelaku UMKM misalnya saja meningkatkan kemampuan dalam administrasi, pengembangan produk, pembukuan, dan juga manajemen usaha (Sugiri, 2020).

Pemerintah sendiri juga memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Menurut PP Nomor 7 tahun 2021 pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan di lakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan

bagi Usaha Menengah. Selain dari Pemerintah, Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank juga memberikan bantuan kepada UMKM agar terwujudnya UMKM yang kokoh (Sitepu, 2017). Dukungan tersebut berupa bantuan untuk pengadaan barang dan juga alat produksi yang memadai.

Pada tahun 2020 dan 2021 UMKM juga memiliki kendala karena adanya pandemi covid yang melanda Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan epidemi yang disebabkan oleh virus corona dan telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang, dan telah menjadi masalah kesehatan global (Hastuti & Djanah, 2020). Berawal di kota Wuhan, di China tepatnya virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia sehingga menyebabkan merebaknya penyakit coronavirus 2019 atau dikenal juga dengan sebutan COVID-19. Tentu saja, kondisi ini tidak boleh dianggap enteng dan dibiarkan begitu saja.

*Coronavirus* merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamily *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*, Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia, pada manusia gejalanya berupa infeksi yang sama dengan penyakit SARS dan MERS, tetapi untuk Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya (Yunus & Rezki, 2020). Covid-19 penularannya sangat cepat maka dari itu di Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya dengan isolasi mandiri.

Tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, pandemi ini juga berdampak pada sektor lain, misalnya pada sektor ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dikarenakan pemberhentian kerja dari perusahaan

tempat mereka bekerja. Karena pandemi yang tidak kunjung membaik, perusahaan mau tidak mau melakukan PHK. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 1.5 juta orang kehilangan pekerjaan mereka. UMKM pun juga tidak terlepas dari hal ini, menurut data dari survei BI, 87,5 UMKM terkena dampak pandemi ini.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah, seperti mengeluarkan kebijakan dengan diberlakukannya *lock down* dan juga *work from home*, yaitu pembatasan kegiatan atau aktivitas diluar rumah (Thaha, 2020). Diharapkan dengan adanya kebijakan ini masyarakat lebih sering berada di dalam rumah sehingga meminimalisir penularan virus corona agar pandemi ini cepat berakhir, akan tetapi di sisi lain kebijakan ini menyebabkan negara harus mengeluarkan dana kepada rakyat untuk menunjang kehidupan mereka. Tentunya dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Faktor penghambat dari kebijakan ini adalah masih tingginya tingkat mobilitas dan juga kesadaran masyarakat yang rendah.

Selain Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan diantaranya PSBB Transisi, PPKM Darurat serta PPKM empat level. Dikeluarkannya kebijakan tersebut dikarenakan pandemi tidak kunjung berakhir. Kemungkinan terburuk jika kebijakan tersebut tidak diberlakukan adalah, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya,

pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat akan kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan PPKM (Kristhy et al., 2021).

Dengan adanya PPKM sebenarnya sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha karena kehilangan konsumen mereka. Oleh karena itu pemerintah juga memberikan kebijakan khususnya kepada UMKM yaitu pemberian dana kepada UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu sebesar Rp 123,46 triliun dikhususkan dalam memberikan dukungan bagi UMKM (Masruroh, dkk, 2021).

Selain hal tersebut pemerintah juga memberikan dukungan kepada umkm yang terdampak berupa memberikan perlindungan dan pemulihan koperasi di tengah pandemi Covid-19 (Kemenkop-UKM, 2020), yaitu: memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, insentif pajak bagi UMKM; pelonggaran dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; perluasan pembiayaan operasional bagi UMKM; menugaskan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan pelatihan secara online.

Dukungan sosial berupa penurunan pajak listik kepada pengguna yang memiliki daya muat 450 watt selama tiga bulan. Namun kegiatan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan terdapat kendala kurang tersalurnya bantuan ini sebab banyak penerima bantuan masih belum terdata secara lengkap. (Sitepu, 2017) Selain bantuan tersebut pemerintah juga memberikan bantuan berupa peringanan biaya pajak selama 6 bulan. Perluasan pembiayaan modal kerja

UMKM juga telah dilakukan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM.

Akibat pandemi ini, UMKM di Kabupaten Gunungkidul juga terkena dampaknya. Menurut Dinas Koperasi UKM ada 20.846 UMKM di kabupaten Gunungkidul terkena imbas dari pandemi ini. Sektor kerajinan dan fashion adalah yang paling banyak terkena dampaknya. Dengan adanya kebijakan PPKM juga sangat berpengaruh kepada Sektor UMKM desa di Gunungkidul yang menjadi penggerak sektor wisata juga ikut terdampak. Sehingga menyebabkan menurunnya omzet pendapatan karena kurangnya permintaan pasar.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pada penelitian ini penulis ingin mengetahui kebijakan apa yang telah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berikan kepada UMKM dan juga faktor apa saja yang menghambat kebijakan tersebut dalam membantu UMKM agar tetap eksis pada masa pandemi sekarang ini. Seperti yang kita tahu bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan agar UMKM mampu melewati masa-masa sulit dengan lebih mudah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19 tahun 2019-2021 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada pelaksanaan strategi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membantu memberdayakan UMKM di masa pandemi tahun 2019-2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

#### **2. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian adalah supaya menjadi rujukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan UMKM khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

## E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Moch. Sulchan, Maya Zulfa Maslihatin, Ely Sekar Sari, Anik Yulikah, Agus Eko Sujianto (Sulchan et al., 2018)	Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi	Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian global juga berdampak pada perekonomian domestik di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Pemerintah telah memberikan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan diringkas menjadi tiga stimulus yaitu fiskal, nonfiskal, dan stimulus ekonomi.
2.	Hemas Citra Maharani, Jaeni (Maharani & Jaeni, 2021)	Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16 No.1 2021	Pemerintah memberikan stimulus di Kota Semarang berupa bantuan sosial kepada pelaku usaha; memberikan insentif pajak, relaksasi, dan resktuntuksi kredit memperluas pembiayaan modal kerja; Kementerian dan pemerintah daerah berperan sebagai penyangga produk usaha kecil, menengah, dan mikro dan pelatihan e-learning.
3.	Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman (Akay et al., 2021)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan	Implementasi atau implementasi Kebijakan BPUM di Kawasan Pelabuhan Gaowang Barat belajar lancar, namun pemerintah desa



No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa Jurnal Governance Vol.1, No. 1, 2021	dan pemerintah kabupaten harus terlibat. Banyak masyarakat yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak memiliki badan usaha tetapi memperoleh BPUM dari pemerintah.
4.	Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana (Dirkareshza et al., 2021)	Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat Jurnal Mercatoria	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 ini terlihat menitikberatkan pada prinsip negara sehat apabila ditinjau dari segi kuantitas. Tidak menutup kemungkinan yang besar apabila dilihat dari segi kualitas, sebagai negara sejahtera juga salah satu tujuan dari beberapa rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5.	Vina Natasya,, Pancawati Hardiningsih (Natasya & Hardiningsih, 2021)	Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Journal of Economics and Business	Pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk penyelamatan usaha kecil, menengah dan mikro. Program penyaluran bansos berupa kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran kredit bantuan bahan baku, dan pembagian paket sembako. Pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya selama pandemi.

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
6.	Kiki Amelia Sari, Luhita Rizkiyana Madhanni, Anugrah Mahirah Al Kharisma, Rita Arsyantie, Bella Fadhilatus Sanah, Munti Kurnia Ningsih, Joan Hesti Gita Purwasi (Purwasih et al., 2021)	Pemberdayaan Melalui Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Omah Jenang Blitar di Masa Pndemi Covid 19. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat.	Akibat dari adanya pandemi, salah satu UMKM mengalami penurunan pendapat. Oleh karena itu, Perlu penguatan strategi, pemasaran produk UMKM. Rencana tersebut bertujuan untuk memberikan solusi strategi pemasaran yang dapat memulihkan perekonomian masyarakat. Hasilnya, UMKM Omah Jenang semakin dikenal masyarakat, dan produk tersebut laku di pasaran
7.	Moh. Musfiq Arifq dan Dedi Junaedi. (Arifqi & Junaedi, 2021)	Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah.	Di masa pandemi Covid 19, digitalisasi UMKM menjadi pilihan lain untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Usaha kecil, menengah, dan mikro merupakan kegiatan ekonomi msyarakat yang dapat memberikan banyak peluang untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Hal ini membutuhkan banyak strategi dan inovasi untuk memperkuat kegiatan tersebut.
8.	Bambang Arianto (Arianto, 2020)	Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Bisnis	Penelitian ini memaparkan pentingnya digitalisasi umkm di masa pandemi agar tetap bisa bertahan dikarenakan publik telah mengurangi interaksi diluar ruangan untuk

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			menekan persebaran dari virus corona. Selain itu, dengan berkembangnya digitalisasi UKM, ekonomi pada tahun 2025, teknologi digital Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
9.	Nungky Wanodyatama Islami, Fajar Supanto, Arisanto Soeroyo (Islami et al., 2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak Covid-19 Jurnal Karta Raharja.	Pemerintah Kabupaten Malang sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini antara lain; bantuan infrastruktur (fsilitas produksi), pameran produk; pelatihan; mempromosikan promosi produk usaha kecil, menengah dan mikro; dll.
10.	Ratnawaty Marginingsih (Marginingsih, 2021)	Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. Moneter; Jurnal Akutansi dan keuangan	Kementerian keuangan telah mengembangkan kebijakan unik untuk mengurangi dampak covid 19 dan perlambatan ekonomi dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini memberikan dampak positif bagi sector UKM di masa pandemi covid 19 sebagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional, Khususnya sector UKM yang berkontribusi relative besar.
11.	Nurdina, Mutiara Rachma Ardhiani, Christina Menuk Sri Handayani, Fachrudy Asj'ari (Nurdina et al., 2021)	Strategi Pemberdayaan UMKM Makanan Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Kedamean Gresik.	Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam perkembangan ekonomi digital adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui pemasaran situs web, tidak banyak pasar

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		Jurnal Pengabdian Masyarakat	sehingga produk UMKM belum dapat menjangkau pasar-pasar di luar daerah dan pelosok, serta belum mampu bersaing dengan usaha besar lain yang telah dikenal melalui layanan jasa internet dan mampu go-Internasional.
12.	Ari Susanti, Yopy Ratna Dewanti, Ria Estiana (Ria Estiana, Yopy Ratna Dewanti, 2021)	Strategi Perencanaan Keuangan Untuk Penjualan Dan Pajak Umkm Di Masa Pandemi BERNAS;Jurnal Pengabdian kepada masyarakat	Stategi dalam menyelamatkan UMKM yaitu meningkatkan pengetahuan digital dan teknologi, peningkatan pengetahuan tentang perencanaan keuangan, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah tentang pajak UMKM di masa pandemi, peningkatan penggunaan media sosial dan inovasi dalam menjalankan usaha.
13.	Esty Pudyastuti, Ahmad Saputra (Pudyastuti & Saputra, 2021)	Upaya Peningkatan Keunggulan Bersaing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Medan Di Masa Pandemi Covid 19 INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia	Untuk dapat mengoptimalkan potensinya, UMKM harus memiliki kualitas strategi yang tepat, serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Beberapa masalah yang sering dihadapi UMKM adalah ketersediaan modal, pemasaran, kurangnya pengetahuan dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Faktor

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			ini merupakan kelemahan terbesar dari usaha mikro kecil dan menengah.

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang menjadi fokus penelitian dimana penelitian yang saya lakukan berfokus pada strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunungkidul. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan alasan Kabupaten Gunungkidul mempunyai ukm dengan potensi sumber daya yang baik untuk diberdayakan. Selain itu, kekayaan alam di wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi tersendiri untuk ikut dalam pengembangan ukm dalam membantu masyarakat sekitar. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 tahun 2019-2021.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Strategi**

#### **a. Teori Strategi**

Menurut KBBI definisi Strategi adalah Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan jika Menurut etimologi Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Dalam strategi yang baik, koordinasi tim kerja memiliki tema, dan faktor pendukung yang ditentukan sesuai dengan prinsip ide pelaksanaan yang wajar, dana yang efisien, dan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi berbeda dengan taktik yang cakupannya lebih

sempit dan waktunya lebih pendek, meskipun keduanya hampir memiliki arti yang sama namun kedua kata tersebut berbeda. Strategi biasanya terkait dengan visi dan misi, meskipun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut (Rusadi & Wedayanti, 2019) strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Menurut (Budiono, 2019) Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dibuat dengan sangat matang sehingga jelas kegiatan apa yang akan dilaksanakan demi mencapai tujuan. Pendapat lain disampaikan oleh Sarwoto Wijoyo Latisuro (Latisuro, 2016) Strategi diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan bagian dari proses yang mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan membuat strategi yang telah dibentuk dapat memenuhi tujuan dari organisasi. Sedangkan Menurut A. Halim Strategi adalah suatu cara dimana sebuah lembaga dan organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan

peluang dan hambatan dari lingkungan luar yang akan dihadapi serta kemampuan dan sumber daya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok. Perumusan strategi dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari strategi tersebut. Strategi juga bisa dikatakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu.

#### b. Tahapan Strategi

Menurut Bambang Hariadi (2005) beberapa langkah dalam merumuskan strategi:

##### A. Perumusan

- 1) Tahap pertama ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu penerapan visi, misi, perencanaan dan tujuan dari strategi.
- 2) Perumusan strategi adalah proses mempersiapkan langkah-langkah ke depan untuk mewujudkan visi dan misi, yang merupakan tujuan strategis untuk memberikan nilai terbaik.
- 3) Identifikasi lingkungan yang akan ditempuh, tentukan misi untuk mencapai visi yang diinginkan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Menganalisis lingkungan secara eksternal atau internal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.



- 5) Menentukan target dan dan tujuan strategi.
- 6) Pemimpin memulai dengan menentukan dalam visinya apa yang menjadi tujuannya dan misi apa yang harus dia lalukan sekarang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

#### B. Pelaksanaan

Setelah fase pengembangan strategi, fase implementasi strategi adalah fase strategi penting lainnya. Implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijakan diimplementasikan melalui pengembangan struktur pengembangan program, anggaran, dan prosedur implementasi. Implementasi strategi merupakan fase yang paling sulit dari proses strategi karena banyak faktor yang mempengaruhi implementasi.

#### C. Analisis SWOT

Rangkuti (2013), Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terjadi pada suatu perusahaan atau untuk mengevaluasi produk sendiri atau pesaing. Analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai suatu metode untuk membentuk strategi suatu perusahaan atau organisasi sebagai suatu unit bisnis. SWOT adalah singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang memiliki arti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan. Analisis ini secara sistematis dapat membantu mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan.

Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Analisis ini mampu mempertimbangkan semua kemungkinan yang muncul dan melihat semua kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, perencanaan dapat terukur dan efektif. Ini digunakan untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka pendek dan panjang.

#### D. Jenis strategi

Menurut David dalam (Hapsari et al., 2008) strategi dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

##### 1) Strategi integrasi

Strategi integrasi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri

##### 2) Strategi intensif yaitu sebuah strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu dengan mengedarkannya secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

##### 3) Strategi diversifikasi adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memperluas perusahaan sehingga membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis yang sama

dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan.

- 4) Strategi Defensif adalah strategi promosi yang mengupayakan atau mengarahkan konsumen pada produk yang dibuat oleh suatu perusahaan.

#### E. Peranan Strategi

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, strategi mempunyai andil yang sangat besar agar tercapainya tujuan, sebab strategi adalah arah tindakan dan cara tindakan itu harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Budio (Budio, 2019) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

- 1) Strategi sebagai pendukung keputusan. Strategi sebagai elemen untuk mencapai keberhasilan. Strategi adalah bentuk atau tema yang menyediakan hubungan yang koheren antara keputusan yang dibuat oleh individu atau organisasi.
- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peran penting dari metode koordinasi dan komunikasi adalah untuk memastikan arah yang sama pada perusahaan.
- 3) Strategi sebagai tujuan, Konsep strategi digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan akan berada di masa depan.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

### A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowermen), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan model sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial.

Menurut Mubarak (2010) Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Menurut Sumardjo dalam (Endah, 2020) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan sendiri dan komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari kesusahan,

kebodohan, dan keterbatasan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tapi juga pranata sosial yang ada (Noor, 2011)

Berdasarkan serangkaian pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok dalam masyarakat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

#### B. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pada umumnya dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Najiati dalam (Sari, 2012) terdapat empat prinsip yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan, yaitu :

##### 1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip pertama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan

mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

## 2) Prinsip Partisipasi

Program Pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3) Prinsip Kemandirian

Prinsip Kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

## 4) Prinsip Berkelanjutan

Program Pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, Secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin kurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

### C. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilson dalam (Sari, 2012) ada tujuh tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh perhatian atau simpati dan partisipasi masyarakat.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
- 7) Peningkatan Kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru

#### D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dalam (Sari, 2012) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Perbaikan Kelembagaan. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaikan Usaha. Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaikan Pendapatan. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan kehidupan. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 6) Perbaikan masyarakat. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.



### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### a. Teori UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UU No 20 tahun 2008 pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta,

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Sedangkan menurut Rudjito dalam (Hamidah et al., 2019) UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan asset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak termasuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Menurut (Eko, 2009) UMKM merupakan suatu organisasi ekonomi atau bisnis yang mempunyai struktur sederhana, sedikit aktivitas yang diformalkan, teknologi yang belum modern, manajemen yang fleksibel, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana (bahkan sering tidak memiliki) serta tanpa elaborasi.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Lebih lanjut kriteria modal usaha UMKM terbaru berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 adalah :

Usaha Mikro mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil

mempunyai modal lebih dari Rp1.000.000.00,00 – Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah mempunyai modal usaha Rp5.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah :

Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### c. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan sebuah cara untuk memberikan peluang usaha perorangan atau unit usaha perorangan yang memenuhi standar usaha kecil dan menengah menurut undang-undang untuk diberdayakan guna meningkatkan talenta, mengoptimalkan sumber dayanya, meningkatkan kapabilitasnya dan meningkatkan keterampilannya. memungkinkan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan hasil upaya bersama pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai sinergi dalam bentuk iklim mikro dan pengembangan usaha Usaha Kecil

(UMKM) sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sulit dan mandiri. Memberdayakan UMKM dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang ketat berarti UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti peningkatan inovasi produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan cakupan pemasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai jual UMKM itu sendiri, terlebih mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, serta mampu bersaing dengan produk luar negeri yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Pasal 8 Tahun 2008, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi:

- 1) Mengembangkan kemandirian, kekompakan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berinisiatif bekerja.
- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan adil.
- 3) Sesuai dengan potensi wilayah dan positioning pasar, sesuai dengan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha.
- 4) Keseluruhan perencanaan, implementasi dan pengendalian.

#### **4. Pandemi Covid 19**

##### **a. Teori Pandemi Covid 19**

Menurut KBBI pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi adalah peningkatan penularan

penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-tiba dan telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut (Solichin & Khairunnisa, 2020) Corona virus atau yang biasa disebut dengan covid 19 merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada tubuh manusia di Provinsi Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Virus ini dapat dituarkan dari manusia ke manusia melalui droplet (cipratan atau percikan liur) dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Menurut (PH et al., 2020) Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti pilek atau penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke manusia.

(Ilpaj & Nurwati, 2020) Menjelaskan bahwa Covid 19 merupakan virus yang berbahaya. Terdapat kurang lebih 200 negara dari berbagai belahan dunia yang telah terjangkit virus ini. Tingginya tingkat kematian di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien positif virus corona, usia rentan, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai.

b. Karakteristik virus corona

- 1) Ukuran virus lebih kecil dari bakteri. Diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer
- 2) Bertahan lama di permukaan benda.

Penelitian oleh Ilmuwan National Institutes of Health and University of California mengklaim virus corona tidak hanya bertahan di udara selama

beberapa jam, namun juga di permukaan benda-benda yang seringkali disentuh orang. Masa inkubasi covid 19 adalah 2-14 hari dari saat pertama pasien terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal sakit.

c. Gejala Penyakit Covid 19

- 1) Gejala umum seperti demam, batuk, kehilangan indra penciuman, dan juga kelelahan.
- 2) Gejala ringan berupa sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit, dan nyeri, diare, ruam pada kulit, dan juga mata merah atau iritasi.
- 3) Gejala serius berupa kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak dan bingung, serta nyeri dada.

**G. Definisi Konseptual**

1. Strategi adalah suatu cara atau tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu cara dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga.
4. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang, tetapi penyakit tersebut juga harus menular.

## H. Definisi Operasional

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial
  - a. Akses kemudahan dalam mendapatkan modal.
  - b. Bantuan modal pemerintah bagi UMKM
2. Strategi pengembangan Pasar
  - a. Media saluran promosi produk.
  - b. Perlindungan pasar.
3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - a. Pengontrolan dan pengkoordinasian pemerintah.
  - b. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM.

Analisis SWOT:

1. Faktor Internal :
  - a. Strength (kekuatan)
    - 1) Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sumber daya alam.
    - 2) Memanfaatkan sumber daya manusia pada Kabupaten Gunungkidul.
  - b. Weakness (kelemahan)
    - 1) Modal yang dimiliki minim.
    - 2) Pengetahuan yang minim (pendidikan rendah)
2. Faktor Eksternal
  - a. Opportunities (peluang)
    - 1) Antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan.



2) Sumber daya alam termanfaatkan dengan baik.

b. Threats (tantangan/ancaman)

1) Penjualan produk tidak setiap hari laku.

2) Pembatasan sosial selama pandemi covid-19

3) Penurunan produksi.

4) Munculnya pengusaha baru

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan jawaban yang diberikan oleh responden guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif secara deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan suatu fenomena yang diteliti (baik itu suatu kejadian atau tindakan) menjadi kata-kata (deskripsi). Metode penelitian ini dipilih karena lebih mudah dalam mendiskripsikan, menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian, terutama karena data-data yang diperoleh berasal dari wawancara terhadap narasumber, sehingga hasil penelitian akan dapat dipahami dengan jelas dan mudah oleh pembaca.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berarti tempat penelitian dimana peneliti akan dapat memperoleh informasi dan data dari narasumber. Penelitian akan dilakukan di wilayah Dinas UMKM Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alasan peneliti mengambil tempat di Gunungkidul karena merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi UMKM yng sangat tinggi.

### 3. Unit Analisis Data

Unit Analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas UMKM dan juga pelaku UMKM.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer yang akan digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, data premier yang diambil adalah, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Strategi pemerintah Kab.GunungKidul dalam pemberdayaan UMKM di masa Pandemi Covid-19	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Wawancara
2	Implementasi pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19	Pelaku UMKM	Wawancara
3	Implementasi pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19	Pelaku UMKM	Wawancara
4	Implementasi pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19	Pelaku UMKM	Wawancara
5	Implementasi pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19	Pelaku UMKM	Wawancara

c. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari dokumentasi beberapa sumber seperti jurnal, laporan, berita, catatan, dan data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

## **5. Teknik Pengumpulan data**

Data-data penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang berarti mengumpulkan dan mencari informasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian (Nilamsari, 2014). Ada dua jenis dokumen resmi menurut Maloeng dalam (Sugiyono, 2012) yaitu dokumen internal berupa catatan, seperti pengumuman, instruksi, aturan dalam suatu lembaga, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan dan lain sebagainya. Kemudian, ada dokumen eksternal berupa bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti koran, surat pernyataan, majalah dan lain sebagainya.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan turun ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan tempat, peristiwa, masalah, fakta, dan objek yang ada.

Dalam melakukan observasi tidak semua hal akan diamati karena pengamatan hanya dilakukan pada cakupan masalah dalam penelitian yang ada. Observasi tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga bisa melakukan pencatatan secara langsung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik mencari dan memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Rahmat, 2009). Di dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis wawancara berdasarkan strukturnya (Rachmawati, 2007). Pertama, wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang sifatnya fleksibel, dimana peneliti mengikuti pemikiran dan jawaban dari narasumber. Dalam wawancara ini, biasanya dimulai dengan pertanyaan umum dan tidak ada pertanyaan khusus yang disiapkan sebelumnya. Wawancara jenis ini cocok digunakan bila wawancara dilakukan lebih dari satu kali dan menghasilkan banyak data, tetapi juga berpeluang menghasilkan banyak data atau informasi yang tidak berguna (dross rate). Kedua, wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pertanyaan umum tapi sudah mengarah pada topik utama. Dalam wawancara ini, penanya atau peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan dross rate yang muncul lebih sedikit daripada wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara berstruktur

yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan mirip dengan kuisioner survei tertulis. Wawancara jenis ini dianggap memiliki kekurangan seperti data yang diperoleh tidak kaya dan mengarahkan jawaban narasumber Jadi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ketiga jenis wawancara diatas, dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan mengacu pada topik dan akan dikembangkan sesuai dengan jawaban dan pendapat dari narasumber serta menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Teknik Analisis data**

Teknik analisis data yaitu kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman peneliti dalam melanjutkan hasil penelitian dan menyajikannya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik ini dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perkembangan UMKM. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang tepat.
- b. Melakukan reduksi data dan meringkas data yang sudah dikumpulkan kedalam suatu konsep, kategori, ataupun tema-tema tertentu.
- c. Penyajian data berarti kegiatan menyusun dan menggabungkan data atau informasi yang sudah diperoleh dan sudah direduksi. Bentuk penyajian

data di dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks narasi berbentuk catatan lapangan, bagan, grafik, tabel, matriks dan sebagainya.

- d. Penarikan kesimpulan dengan mengacu pada data yang sudah disusun. Di tahap ini, peneliti akan bisa menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan.